

EVALUASI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN ARGAPURA DISTRIK JAYAPURA SELATAN KOTA JAYAPURA

Santrio¹, Donny Wijaya^{2*}

¹Universitas Yapis Papua, Jayapura, ²Universitas Samawa, Sumbawa Besar

Penulis Korespondensi: sandroacin@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: Mei 2022</i> <i>Revised: June 2022</i> <i>Published: 30 June 2022</i>	
Keywords <i>Evaluasi;</i> <i>Pelayanan;</i> <i>Efektifitas;</i>	Adapun masalah yang dialami oleh pimpinan Kelurahan Argapura, yakni tingkat kedisiplinan pegawai, terutama ketepatan waktu masuk bekerja, dan masih terdapat beberapa ruangan kerja para kepala seksi yang belum diperbaiki, sehingga beberapa kepala seksi menggunakan ruangan kerja yang belum memadai. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka untuk mengetahui permasalahan ini, penulis ingin meneliti tentang Evaluasi Hasil Musrenbang Di Kelurahan Agapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. Tujuan yang ingin di capai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Hasil Musrenbang Di Kelurahan Agapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka sasaran penelitian dilakukan dengan melakukan opservasi pada tahapan pembangunan kampung dan elemen pemberdayaan masyarakat. Digunakan Metode Penelitian kualitatif dalam proses pengambilan data dan analisa. Pengambilan sampel menggunakan teknik Teknik Informan Dan Wawancara yang didasarkan pada peran dan pelaku pada tingkat Kelurahan. Musrenbang tingkat Kelurahan besarnya sampel dibagi menjadi dua kelompok yaitu masyarakat yang berada pada lokasi kegiatan dan masyarakat yang tidak berada pada lokasi kegiatan pembangunan kampung melalui program pelayanan. Secara umum efektifitas pembangunan kampung dalam untuk Program Evaluasi Hasil Musrenbang Di Kelurahan Agapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura efektif. Peningkatan tersebut dilakukan melalui upaya pelayanan program, pembangunan Kelurahan Mengikut sertakan masyarakat dalam kelompok kerja diperlukan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan dan merangsang aspirasi masyarakat, keberlanjutan program perlu melibatkan Pemerintah Kelurahan Argapura, mengadakan, mediasi diperlukan untuk meningkatkan kemauan mendahulukan kepentingan umum, kepercayaan, organisasi dan keselarasan padai Hasil Musrenbang Di Kelurahan Agapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.

PENDAHULUAN

Kedudukan Musrenbang atau Musrenbangda tersebut dengan mekanisme perencanaan sebagai upaya mewujudkan perencanaan partisipatif melalui tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam setiap formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Musrenbang dibagi dalam beberapa tingkatan, yakni : Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Musrenbang Tingkat Kabupaten/Kota, Musrenbang Tingkat Provinsi, Musrenbang Tingkat Nasional.

Kota Jayapura yang telah melaksanakan proses mekanisme perencanaan pembangunan daerah, dimana secara formalitas masyarakat berpartisipasi dalam proses Musrenbang karena menurut mereka bahwa mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang mengikutsertakan masyarakat dapat bermanfaat untuk memberikan masukan mengenai permasalahan yang terdapat di daerah tersebut. Dalam menunjang pembangunan suatu daerah, maka Visi dan Misi yang harus dicapai adalah peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perlunya keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat yang tertuang dalam UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dimana masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya mekanisme perencanaan pembangunan yang berupa Musyawarah Perencanaan Pembangunan, masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam lingkup tingkat kelurahan ataupun tingkat kecamatan. Menurut peneliti dalam observasi awal dilapangan menemukan bahwa di kelurahan Argapura Kota Jayapura hampir memiliki masalah yang sama dalam Musrenbang. tidak semua masyarakat di kelurahan ikut berpartisipasi dalam pembangunan dengan berbagai alasan.

Pertama, kurangnya komunikasi atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai program kerja yang akan dijalankan. Hal ini disadari karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Didalam sosialisasi diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat tentang partisipasi dalam pembangunan, yaitu adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. Dengan diadakannya sosialisasi akan merubah sikap serta tindakan masyarakat yang selanjutnya menjadi dukungan untuk berpartisipasi. Namun dengan kurangnya sosialisasi atau komunikasi antar keduanya menyebabkan masyarakat menjadi apatis dalam pembangunan. Hal ini menunjukan betapa besar peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat demi tercapainya pelaksanaan program pembangunan yang maksimal di Kota Jayapura.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih jauh tentang fenomena yang terjadi dilapangan dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul : “Evaluasi Hasil Musrenbang Di Kelurahan Agapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. Hal tersebut didasari atas pertimbangan untuk mendapatkan informasi dan data yang valid dan akurat berkaitan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagaian ini peneliti akan mencoba memaparkan hasil kajian berdasarkan pada indikator yang telah ditetapkan, untuk lebih memahami capaian kajian dari penelitian ini, maka dapat dipaparkan hal-hal seperti berikut di bawah ini:

1. Input,

Aspek input adalah masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan program kerja yang diusulkan, dengan mengkaji tentang sejauhmana peserta diberikan kesempatan dalam memberikan masukan atau usulan rencana program dalam pelaksanaan musrenbang di Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. Pada tahapan ini secara umum dalam hal pemberian kesempatan kepada semua peserta dalam hal penyampaian usulan program kerja yang

akan dilaksanakan, maka diperoleh gambaran bahwa panitia musrenbang telah membuka ruang seluas mungkin kepada masyarakat atau semua komponen yang hadir pada saat Musrenbang tingkat kelurahan pada tahapan penjaringan ide, gagasan atau rencana program yang diusulkan, program apa saja yang menjadi tuntutan dari masyarakat dan memberikan alasan akan pentingnya program tersebut, pada umumnya dapat diterima oleh pelaksana musrenbang tersebut, namun tentunya tidak semua dapat kita akomodir, karena selain keterbatasan dana yang diterima, juga tingkat kepentingan program tersebut bukan merupakan program yang mendesak dan perlu ditindak lanjuti secara cepat, terutama pada program yang sifatnya usulan yang telah diakomodir pada tahun-tahun sebelumnya dan dianggap belum terlalu penting untuk deprogramkan pada tahun ini.

Berdasarkan pada data sekunder yang peneliti peroleh, berkaitan dengan penjaringan ide, gagasan atau usulan program dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan di Kelurahan Argapura, secara garis besar diperoleh hasil dimana pada bidang fisik sarana dan prasarana sesuai dengan skala prioritasnya diperoleh hasil sebanyak 48 program atau rencana kegiatan yang dilaksanakan pada berbagai RT dan RW di wilayah Kelurahan Argapura dengan sumber biaya dari Anggaran Kelurahan yaitu Dana Alokasi Umum sebanyak 33 program dan dari Anggaran OPD sebanyak 15 program atau usulan kegiatan, dengan kelompok bidang OPD terdiri dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan.

Selanjutnya program atau usulan kegiatan pada bidang social budaya, berdasarkan data hasil musrenbang dengan memperhatikan unsur skala prioritas program sesuai ketentuan yang ada, maka terakomodir program sebanyak 51 kegiatan yang tersebar pada setiap RT dan RW dengan sumber pembiayaan terdiri dari 5 program bersumber dari Anggaran OPD, dengan kelompok bidang OPD terdiri dari Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Diklat, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan Kota Jayapura dan Dinas Sosial/kantor Agama/ Sekretariat KPAD. dan 46 program atau kegiatan bersumber dari Anggaran Kelurahan melalui dana alokasi umum.

Pada program atau usulan kegiatan tahunan melalui Musrenbang tingkat kelurahan di Kelurahan Argapura, secara khusus pada Bidang Ekonomi, berdasarkan data sekunder yaitu dokumen rencana kerja tahunan Kelurahan Argapura, diperoleh data bahwa usulan rencana kegiatan pada bidang ini tercantum sebanyak 59 program atau rencana kegiatan, dengan sumber dana terdiri dari Anggaran Kelurahan berupa Dana Alokasi Umum sebanyak 53 program atau rencana kegiatan dan 6 program dengan usulan dana atau sumber pembiayaan dari Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu dari Badan Pendapatan Daerah, BPKAD/BPN, BAPPEDA/BPS, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Perikanan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

2. Proses

Aspek Proses adalah bagaimana sebuah masukan diwujudkan dalam bentuk aktivitas pelaksanaan program, dengan mengkaji tentang sejauhmana sebuah masukan atau usulan

program tersebut diwujudkan dalam bentuk aktivitas pelaksanaan program di Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.

Perencanaan adalah proses untuk mengatur dan menentukan tindakan yang tepat melalui musyawarah. Proses ini dimulai dengan inventarisasi kebutuhan dengan mempertimbangkan kekuatan yang tersedia. Dalam Musyawarah perencanaan pembangunan harus mengoptimalkan peserta, karena masyarakat adalah pemetik utama dari hasil pembangunan.

Persoalan pemerintahan terutama berkaitan dengan siapa sesungguhnya yang akan menjadi pemetik manfaat utama (beneficiaries) dari penyelenggaraan pemerintahan. Bagi suatu negara demokratis, maka jawaban pertanyaan ini jelas: rakyat. Dengan demikian rakyatlah yang menjadi sumber utama inspirasi dan aspirasi dari setiap penyelenggaraan fungsi dan kegiatan pemerintahan. Berdasarkan penegasan ini, maka persoalan pemerintahan berikutnya adalah berkaitan dengan bagaimanakah inspirasi dan aspirasi rakyat itu dikelola secara sepatutnya. (Muchlis Hamdi, 2002: 126). Pengelolaan inspirasi dan aspirasi itu diawali dengan memunculkan inventarisasi daftar kebutuhan, yang selanjutnya dibingkai dalam sistem perencanaan. Telah banyak uraian dan definisi konsep dasar tentang perencanaan yang maknanya sangat luas karena kesemuanya mempunyai ruang lingkup.

Dalam teori perencanaan ada tiga hal utama yang perlu dipahami, (a) definisi perencanaan, (b) substantif perencanaan, yaitu apa yang akan direncanakan dan untuk siapa merencanakannya, dan (c) normatif perencanaan yaitu bagaimana dan apa alasan perencanaan yang akan disusun. (Ali Kabul Mahi dan Sri IndraTrigunarso, 2017: 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam Ketentuan Umum Pasal 1, menegaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah melalui Proses Musrenbang (Heru Sulistiyo) yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

3. Output

Aspek output adalah hasil dari pelaksanaan program. Apakah suatu pelaksanaan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dengan mengkaji tentang sejauhmana hasil dari pelaksanaan program dari hasil musrenbang tersebut sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.

Musrenbang merupakan forum untuk melakukan identifikasi permasalahan yang ditemukan di tingkat Kelurahan dan menentukan prioritas yang akan diusulkan pada Musrenbang tingkat Distrik. Keluaran Musrenbang adalah merumuskan solusi atau usulan program, dan rencana sumber pendanaannya. Usulan program/kegiatan terdiri dari:

Daftar Usulan Bantuan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Wilayah kelurahan, Usulan ini merupakan usulan pembangunan fisik sarana prasarana yang merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan di wilayah kelurahan; Karena kemungkinan banyaknya usulan kegiatan yang memerlukan pendanaan dari Pemerintah Kota melalui alokasi APBD, maka dibatasi untuk memilih 5 usulan kegiatan prioritas saja yang akan dibawa ke Musrenbang Distrik. Usulan disusun berdasarkan urutan prioritas; Pemilihan 5 usulan solusi prioritas tersebut didapatkan melalui musyawarah dengan mendasarkan kepada tingkat kepentingannya, dengan memperhatikan:

- a. Tingkat kebutuhan mendesak: kebutuhan tersebut tidak dapat ditunda dan apabila tidak segera ditangani akan mengganggu aktivitas warga masyarakat;
- b. Tingkat Dampak atau Manfaat: Kebutuhan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, jika tak dipenuhi akan mengakibatkan munculnya masalah lain;

4. Outcomes

Aspek output adalah suatu pelaksanaan program berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuannya, dengan mengkaji tentang sejauhmana pelaksanaan program hasil musrenbang berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuannya di Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.

Terkait aktivitas Musrenbang dalam hal outcomenya, maka diperoleh gambaran bahwa apabila program-program prioritas lebih diutamakan, maka akan berdampak secara nyata pada kelompok sasarannya, dimana dengan keberadaan dana yang relatif terbatas namun dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang terbantu, Sejauh ini program yang dilaksanakan dari usulan hasil musrenbang, berdampak positif pada masyarakat sebagai kelompok sasaran, dimana program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuannya, dan diterima oleh masyarakat,

KESIMPULAN

Dari segi input panitia musrenbang telah membuka ruang seluas mungkin kepada masyarakat atau semua komponen yang hadir pada saat Musrenbang tingkat kelurahan pada tahapan penjaringan ide, gagasan atau rencana program yang diusulkan, program apa saja yang menjadi tuntutan dari masyarakat dan memberikan alasan akan pentingnya program tersebut, pada umumnya dapat diterima oleh pelaksana musrenbang tersebut, namun tentunya tidak semua

dapat kita akomodir, karena selain keterbatasan dana yang diterima, juga tingkat kepentingan program tersebut bukan merupakan program yang mendesak .

Secara umum proses pelaksanaan musrenbang di Kelurahan Argapura berjalan lancar dan sesuai harapan, walaupun tidak semua undangan hadir, hal tersebut dikarenakan berbagai kesibukan, walaupun pada pelaksanaannya mengalami keterlambatan dan ada beberapa usulan program yang tidak dapat diakomodir dari sebagian RW karena dianggap tidak masuk dalam program prioritas.

Banyaknya masukan pada saat musrenbang yang bersumber dari berbagai pemangku kepentingan, namun tentunya harus dipahami bahwa output yang diharapkan dari Musrenbang tersebut adalah tersusunnya program kerja berdasarkan pada prioritas bidang diantaranya sarana prasarana, bidang ekonomi, bidang social budaya, bidang pemerintahan/ pelayanan umum dan bidang lingkungan hidup, hasil yang diperoleh sangat sesuai dengan harapan, dimana usulan program yang dipandang prioritas dapat diterima dan dimasukkan dalam usulan program hasil Musrenbang tersebut.

Dari sisi outcomes, apabila program-program prioritas lebih diutamakan, maka akan berdampak secara nyata pada kelompok sasarannya, dimana dengan keberadaan dana yang relatif terbatas namun dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang terbantu, Sejauh ini program yang dilaksanakan dari usulan hasil musrenbang, berdampak positif pada masyarakat sebagai kelompok sasaran, dimana program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuannya, dan diterima oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, C. (1994). *Partisipasi Bukan Sekedar Pengerahan Dana*, suara merdeka, Jakarta.
- Bintoro, B. (1979). *Perencanaan Pembangunan*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- Direktorat Pemerintahan Desa. (1981). *Bina Pemerintahan Desa*, Depdagri, Jakarta.
- Gibson, G, et al. (1989). *Organisasi dan Manajemen, Perilaku, Struktur, Proses*, Jakarta : Gramedia
- Gie, L. (1968). *Kamus Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung
- Harjana, H. (1976). *Aspek-Aspek Kepemimpinan*, Bandung : Sinar Grafika.
- Kustawa A. (1985). *Manajemen Pembangunan Desa*, Jakarta : Grafika Utama.
- Koentjaraningrat, K. (1990). *Kebudayaan mentalitas Dan Pembangunan*, Jakarta : Gramedia Baru.
- Ndaraha, T. (1986). *Materi Pokok Pembangunan Masyarakat*, Jakarta: PT. Karunika,.